

TRANSACTION COST, AGENCY THEORY, DAN STAKEHOLDER THEORY DALAM TEORI (DESAIN) ORGANISASIONAL: KAJIAN ASUMSI-ASUMSI DASAR*

GAGARING PAGALUNG
Universitas Hasanuddin

This paper is to provide three perspectives on organizations recently have been the object of increasing interest: Transaction Cost, Agency Theory, and Stakeholder Theory. This reviews of organization concepts and basic assumptions, where is underlying why three perspectives not be integrated within each other. The main difference of these perspectives is Stakeholder Theory has moral principles or deontological base as a normative theoretical, while two others are not accommodated their principle.

Keywords : Transaction cost, Agency theory, Stakeholder theory, Moral principles

PENDAHULUAN

Ada beberapa perspektif yang membahas desain organisasional dalam disiplin ilmu ekonomi, diantaranya *Transaction cost* atau *Market failure approach*, *Agency theory*, dan *Stakeholder theory*. Dua diantara ketiga perspektif tersebut yaitu *Transaction cost* dan *Agency theory* memiliki asumsi dasar yang hampir sama sehingga arah perkembangan perspektif tersebut searah. Selain itu, kedua perspektif tersebut telah lama diaplikasikan dalam pengembangan ilmu ekonomi -termasuk teori organisasi- sehingga telah menjadi *mainstream* dalam disiplin ilmu ekonomi. Berbeda halnya dengan perspektif ketiga yaitu *Stakeholder theory*, perspektif ini relatif muda dan baru berkembang dalam kurun waktu 15 tahun terakhir.

Usaha-usaha untuk mengintegrasikan ketiga perspektif tersebut telah dilakukan, karena manajemen *stakeholder* dapat dihubungkan dengan konsep konvensional yang selama ini menjadi *mainstream* melalui argumen

* Paper ini merupakan salah satu tugas dalam menempuh matakuliah Teori Organisasi di Program Doktor FE UGM Yogyakarta. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hani Handoko, Ph.D sebagai dosen pengasuh dan peserta Simposium Nasional *Surviving Strategies to Cope with The Future* FE-UAJ, Yogyakarta, September 2002

analitikalnya. Namun, hingga saat ini belum mencapai titik temu sebagaimana layaknya hubungan antara *Transaction cost* dengan *Agency theory*. Donaldson dan Preston (1995: 78-80) mengemukakan dalam artikelnya bahwa usaha pengintegrasian *Transaction cost* dengan *Stakeholder theory* telah dilakukan oleh Evan dan Freeman, (1988 & 1990), sedangkan pengintegrasian antara *Agency theory* dengan *Stakeholder theory* telah dilakukan oleh Hill dan Jones (1992) dan Sharplin & Phelps, (1989).

Dengan dasar ketiga perspektif di atas, penulis akan membahas ketiga perspektif tersebut dengan cara membandingkan dan menganalisis beberapa perbedaan mendasar dari ketiga perspektif, terutama *Stakeholder theory* sebagai teori yang relatif baru. Hal ini dilakukan untuk menemukan beberapa isu-isu perbedaan yang mendasar, agar dapat diungkapkan mengapa hingga saat ini *Stakeholder theory* tidak dapat berinteraksi dan berintegrasi dengan kedua perspektif lainnya.

Tujuan penulisan artikel ini adalah mengungkapkan perbandingan konsep dasar disain organisasional ketiga perspektif di atas, dengan cara menganalisis beberapa perbedaan mendasar dari ketiga perspektif tersebut, sehingga terungkap mengapa ketiga teori tersebut sulit berintegrasi. Pembahasan artikel ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama membahas secara ringkas (*overview*) ketiga teori yang berkembang dalam teori organisasional, khususnya dalam disiplin ilmu ekonomi, yaitu *transaction cost* atau *market failure approach*, *agency theory*, dan *stakeholder theory*, kemudian bagian kedua akan membahas perbandingan ketiga perspektif teori organisasional, bagian ketiga akan membahas beberapa isu-isu yang mendasar dari ketiga perspektif tersebut. Pada bagian akhir tulisan ini diungkapkan kesimpulan dan implikasi.

Review Tiga Perspektif Teori Organisasional

1. Transaction Cost

Perspektif *transaction cost* atau *market failure approach* dikembangkan pertama kali oleh Williamson (1975). Perspektif ini memandang bahwa keberhasilan suatu organisasi diukur dari kemampuan para manajer perusahaan untuk mengelola transaksi-transaksi ekonomi secara efisien. Definisi *transaction cost* itu sendiri adalah harga negosiasi kontrak dan *renegotiation* kontrak-kontrak yang mencakup kos selama berlangsungnya kontrak, kos selama pengumpulan informasi, dan auditing dan penegakan dan pelaksanaan kontrak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perspektif *transaction cost* merupakan perspektif yang memandang suatu organisasi dari perspektif efisiensi.

Williamson dan Ouchi (1981) menjelaskan rerangka kegagalan (*failure framework*) organisasional kedalam 2 faktor utama yang merupakan asumsi dasar perspektif ini, yaitu: (1) faktor-faktor manusia yang terdiri *bounded rationality* dan *opportunism*. (2) faktor-faktor lingkungan yang terdiri dari *uncertainty/complexity* dan *small numbers* atau *noncompetitive market*. *Bounded rationality* merujuk pada kenyataan bahwa manusia

adalah subjek informasi yang memiliki keterbatasan pemrosesan informasi, sedangkan *opportunism* merujuk pada kenyataan bahwa manusia akan bereaksi dengan kepentingan diri sendiri (*self-interest*) dan menipu (*guile*) dalam rangka mempercepat pencapaian tujuannya sendiri. (Williamson, 1975). Faktor lingkungan yang merupakan karakteristik lingkungan mengasumsikan bahwa lingkungan adalah kompleks dan tidak pasti, dan hubungan perubahan dalam *transacsion cost* adalah jumlahnya sedikit atau terjadi dipasar yang tidak kompetitif.

Secara umum inti metodologikal perspektif *transaction cost* adalah:

1. Transaksi adalah dasar unit analisisnya;
2. Agent manusia adalah subjek untuk *bounded rationality* dan *self-interest*;
3. Dimensi kritis untuk menjelaskan transaksi-transaksi adalah frekwensi, ketidakpastian, dan investasi khusus-transaksi;
4. Penghematan kos transaksi adalah faktor utama dalam menjelaskan kelangsungan hidup kontrak, khususnya yang berkaitan isu-isu disain organisasional;
5. Penilaian perbedaan kos transaksi adalah suatu tugas institusional komparatif (Williamson dan Ouchi, 1981: 367).

2. Agency Theory

Perspektif *Agency theory* berkembang dalam disiplin ilmu ekonomi dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh dengan pemikiran perspektif tersebut adalah Ross (1973), Jensen & Meckling (1976), dan Eisenhardt (1989). *Agency theory* awalnya mulai berkembang pada tahun 1960an dimana pada saat itu penekanan utama para ekonom adalah mengeksplorasi pembagian risiko (*risk sharing*) pada sejumlah individu atau kelompok yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi. Permasalahan yang muncul dalam pembagian risiko tersebut adalah perbedaan sikap atas risiko itu sendiri dari sejumlah pihak yang berkepentingan. Hal ini terjadi karena konsep utama perspektif ini memandang organisasi sebagai *nexus of contract* (Jensen & Meckling, 1976). Kontrak yang dimaksud adalah kontrak yang terjadi antara investor perusahaan (*principal*) dengan manajer perusahaan atau agensi (*agent*).

Konsekuensi dari pandangan perspektif *agency theory - nexus of contract* - ini menimbulkan permasalahan yang dapat digolongkan kedalam 2 golongan besar, yaitu permasalahan agensi (*the agency problem*) dan pembagian risiko (*the problem of risk sharing*). Permasalahan agensi muncul ketika terjadi konflik antara prinsipal dan agensi yang berkaitan dengan tujuan (*goals*) perusahaan, dan ketika prinsipal mengalami kesulitan memverifikasi pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh agensi. Sedangkan permasalahan pembagian risiko muncul ketika prinsipal dan agensi memiliki perbedaan cara pandang yang berbeda atas risiko itu sendiri.

Untuk mengatasi kedua permasalahan di atas, teori agensi menawarkan 2 alternatif pemecahan yaitu pembuatan kontrak yang berorientasi pada berperilaku (*behavioral-oriented contract*) dan ber-orientasi pada hasil (*outcome-oriented contract*), (Eisenhardt, 1989).

Asumsi-asumsi yang mendasari teori agensi adalah:

1. Asumsi yang berkaitan dengan manusia, yaitu *self-interest*, *bounded rationality*, dan *risk aversion*.
2. Asumsi organisasi, yaitu terdapat konflik tujuan diantara anggota baik prinsipal maupun agensi, dan
3. Asumsi informasi yang memandang informasi sebagai suatu komoditas (*commodity*) yang dapat dibeli.

Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, teori agensi berkembang dalam dua perkembangan atau kategori, yaitu teori agensi positif (*positivist agency theory*) dan riset prinsipal-agensi (*principal-agency research*). Teori agensi positif merupakan teori agensi yang mengidentifikasi situasi yang berkaitan dengan terjadinya konflik tujuan antara prinsipal dan agensi dan menjelaskan mekanisme *governance* atas keterbatasan perilaku *self-serving* agensi. Sedangkan kategori riset prinsipal agensi merupakan teori agensi yang menekankan suatu teori umum yang berkaitan dengan hubungan prinsipal dan agensi, dimana teori tersebut dapat diaplikasikan kedalam bentuk lainnya seperti hubungan antara manajer puncak (*employee*) dengan manajer menengah (*employee*), pengacara dengan klien, pembeli dengan suplier dan sejenisnya.

3. *Stakeholder Theory*

Teori stakeholder (*stakeholder theory*) pertama kali diperkenalkan oleh Freeman dengan menerbitkan buku yang berjudul *Strategic Management: A Stakeholder Approach* (1984), kemudian berkembang hingga saat ini lebih dari 100 artikel dan sejumlah buku-buku menulis mengenai teori stakeholder sebagai model perusahaan (Donaldson & Preston, 1995: 65). Dari berbagai artikel dan buku teks, istilah *stakeholder theory* bervariasi, seperti *the concep of dtakeholder*, *stakeholder model*, *stakeholder management*, dan *stakeholder theory*.

Definisi teori stakeholder itu sendiri dalam berbagai artikel bervariasi. Shankman (1999) mengungkapkan bahwa ada beberapa penulis mendefinisikan teori stakeholder sebagai sejumlah individual atau kelompok yang memiliki suatu kepentingan yang dipengaruhi oleh perusahaan (Freeman, 1984, dan Carroll, 1989). Definisi lain diungkapkan Clarkson (1995) yang menyatakan sebagai kelompok atau individual yang mempunyai beban aktivitas risiko dengan perusahaan. Freeman (1984) membagi 2 kelompok stakeholder, (1) *primary stakeholder* yaitu pihak secara formal, official atau yang terikat dengan kontrak yang berhubungan dengan perusahaan. (2) *secondary stakeholder* adalah pihak-lain selain *primary stakeholder*.

Donaldson dan Preston (1995) mengungkapkan ada 3 jenis teori stakeholder, yaitu (1) *Descriptive/Empirical*, (2) *Instrumental*, dan (3) *Normative*. Teori deskripsi adalah teori yang digunakan untuk menjelaskan, dan kadang-kadang mengeksplanasi karakteristik dan perilaku perusahaan secara spesifik. Teori instrumental digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau *lack of connections* antara manajemen stakeholder dengan pencapaian tujuan perusahaan tradisional. Sedangkan teori normatif digunakan untuk menginterpretasi fungsi perusahaan yang mencakup identifikasi moral atau pedoman filosofikal untuk operasi dan manajemen perusahaan. Esensi teori stakeholder adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang berkepentingan secara legitimate dalam prosedural dan atau aspek substantif aktivitas perusahaan. Implikasi dari pengertian teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan dipandang sebagai suatu kumpulan pihak-pihak yang berkepentingan secara kompetitif dan bekerjasama melalui suatu nilai intrinsik (*a nexus of cooperative dan competitive interest possessing intrinsic value*). Dengan demikian konsep teori stakeholder dapat dikatakan bahwa bukan hanya suatu elemen deskripsi mengenai bentuk perusahaan, melainkan juga secara implisit atau eksplisit terdapat *moral claim* untuk mempengaruhi perusahaan sebagaimana tugas lainnya.

Perbandingan Tiga Perspektif Teori Organisasional dalam Disiplin Ekonomi

Tiga perspektif yang ada di disiplin ilmu Ekonomi, yaitu *transaction cost*, *agency theory*, dan *stakeholder theory* akan dianalisis dengan melihat perbandingan asumsi-asumsi dasar dari ketiga perspektif. Asumsi-asumsi dasar yang dianalisis meliputi empat dimensi, yaitu dimensi teoritikal, dimensi manusia, dimensi organisasional, dan informasi. Keempat dimensi tersebut disadur dari dua artikel, yaitu Shankman (1999) dan Eisenhardt (1989). Ringkasan asumsi-asumsi dasar dari ketiga perspektif tersebut dipaparkan dalam Tabel 1.

Aspek teoritikal merupakan aspek penting bagi ketiga perspektif tersebut, karena aspek teoritikal ini yang menjadi dasar adanya perspektif tersebut. Dalam aspek teoritikal sebagaimana digambarkan dalam tabel di atas, nampaknya terjadi perbandingan mendasar antara ketiga perspektif, namun perspektif *transaction cost* dan *agency theory* memiliki kesamaan pandangan dalam aspek ini. Hal ini terjadi karena kedua aspek di atas memiliki level analisis yang sama yaitu individual, sedangkan pada *stakeholder theory* selain analisis individual, juga perusahaan dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan level analisis *stakeholder theory* lebih luas. Dari aspek unit analisisnya menunjukkan bahwa pada prinsipnya *transaction cost* dan *agency theory* memiliki kesamaan yaitu transaksi, namun dalam *agency cost* secara implisit telah tercover didalam kontrak. Sedangkan *stakeholder theory* lebih menekankan pada pihak-pihak yang berkaitan atau yang memiliki kepentingan perusahaan.

Dasar normatif hubungan antara prinsipal dengan agensi didasari pada

TABEL 1

Perbandingan Asumsi-asumsi *Transaction cost*, *Agency Theory*, dan *Stakeholder Theory*

Dimensi	<i>Transaction cost</i>	<i>Agency theory</i>	<i>Stakeholder Theory</i>
Aspek Teoritikal:			
<i>Level of analysis</i>	<i>Individual</i>	<i>Individual</i>	<i>Individual/Firm/Societal</i>
<i>Unit of analysis</i>	<i>Transaction</i>	<i>Contract</i>	<i>Interests/relationships</i>
<i>Normatif basis of relationship</i>	<i>Economic</i>	<i>Economic</i>	<i>Prinsipled moral reasoning</i>
<i>Criteria for organizational effectiveness</i>	<i>Economizing on transaction cost</i>	<i>Efficiency</i>	<i>Fairness</i>
Aspek Manusia:			
<i>Primary relationship</i>	<i>Owner-manager</i>	<i>Owner-manager</i>	<i>All stakeholders (ranked)</i>
<i>Description of managers</i>	<i>Immoral/amoral</i> <i>Anti-social</i> <i>Anti-organizational</i>	<i>Immoral/amoral</i> <i>Anti-social</i> <i>Anti-organizational</i>	<i>Moral</i>
<i>Asumption of human behaviour</i>	<i>Bounded rationality</i> <i>Self-interest</i>	<i>Bounded rationality</i> <i>Self-interest</i>	<i>Bounded rationality</i> <i>Risk aversion</i>
<i>Motive</i>	<i>Psychological egoism</i> <i>Rational preference seekers</i>	<i>Psychological egoism</i> <i>Rational preference seekers</i>	<i>Contingent</i> <i>Enlightened self-interest</i>
<i>Type of rights</i>	<i>Negatif</i>	<i>Negatif</i>	<i>Economic & Social</i> <i>Principled moral reasoning</i>
<i>Overriding principle</i>	<i>Minimize transaction cost</i>	<i>Maximize firm NPV</i> <i>Minimize agency cost</i>	<i>Equilibrium of interests</i>
Aspek Organisational	-	<i>Goal conflict</i>	<i>Contingent</i>
Informasi	<i>Governance</i>	<i>As commodity</i>	

Sumber: Shankman (1999) dan Eisenhardt (1989)

dasar yang sama, yaitu ekonomi. Namun di dalam *stakeholder theory* dasar normatifnya berbeda karena lebih menekankan pada pertimbangan prinsip moral ketimbang ekonomi. Prinsip moral ini bukan menjadi pertimbangan utama didua perspektif, yaitu *transaction cost* dan *agency theory*. Hal ini disebabkan karena asumsi yang mendasari praktik perilaku manusia dan kriteria organisasional dari kedua perspektif bukan menjadi pertimbangan utama. Dari aspek kriteria apa yang ingin dicapai dari ketiga perspektif tersebut yakni efektifitas (*effectiveness*) organisasional nampaknya *stakeholder theory* berbeda dengan kedua perspektif. Konsep kewajaran (*Fairness*) menjadi kriteria efektifitas perusahaan untuk *stakeholder theory* karena level analisis, unit analisis, dan dasar normatif hubungan antara pihak yang berkepentingan memiliki derajat yang sama, dalam arti pihak yang berkepentingan bukan hanya prinsipal (*agency theory*) dan agensi (*transaction cost*) saja, tetapi semua pihak yang terkait dan yang berhubungan dengan perusahaan (*Interests*).

Aspek manusia merupakan dimensi utama selain dimensi teoritikal, karena aspek inilah yang menjadi dasar kegiatan perusahaan. Hubungan antara pemilik perusahaan atau investor (prinsipal) dengan pihak pelaksana atau para manajer (agensi) dan pihak lainnya yang terkait dengan perusahaan menjadi fokus utama dari disiplin ekonomi. Jika dilihat hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, nampak bahwa *transaction cost* dan *agency theory* hanya mempertimbangkan hubungan searah yaitu *prinsipal - agensi*. Konsekuensi yang timbul dari hubungan ini adalah munculnya permasalahan konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal dan agensi, dan perilaku menyimpang (*disfunctional behaviour*) dari agensi. Hal ini terjadi karena asumsi dasar kedua perspektif tersebut memungkinkan munculnya dua permasalahan tersebut. Konflik kepentingan akan muncul antara prinsipal dengan agensi karena asumsi *bounded rationality, self-interest, risk aversion*. Sedangkan permasalahan *dysfunctional behaviour* muncul, karena selain ketiga asumsi yang menyebabkan munculnya konflik kepentingan, juga motif *psychological egoism* akan memicu munculnya problem perilaku menyimpang yang dilakukan agensi.

Perilaku manajer (agensi) sebagai aktor utama dalam pengelolaan perusahaan menjadikan salah satu faktor kunci dalam analisis hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dua perspektif -*transaction cost* dan *agency theory*- pertama menjelaskan motif dan deskripsi manajer yang dituntut untuk berperilaku egoisme, anti-sosial, anti-organisasional, dan amoral. Konsep dasar ini merupakan pijakan agensi dalam menjalankan aktivitas perusahaan, hal ini terjadi karena motif aktivitasnya hanya ditujukan untuk kepentingan prinsipal semata. Selain itu dasar kedua teori tersebut lahir dari semangat dan ideologi kapitalisme yang melekat di kedua teori tersebut. Berbeda halnya dengan *stakeholder theory* yang menunjukkan bahwa perilaku anti-sosial, anti-organisasional, amoral, *self-interest*, dan egosime psikologikal bukanlah menjadi asumsi atau semangat bagi para manajer (agensi) dalam mengelola aktivitas perusahaan. Hal ini didasari karena *stakeholder theory* didasari pada apa yang dikenal dengan basis *deontological*. Teori *deontological* merupakan teori yang

dikembangkan oleh Immanuel Kant (Kant, 1785) yang percaya bahwa individu-individu memiliki moral yang sama dimana mereka mempunyai kapabilitas menentukan secara independen kebenaran dan kejahatan dari akting mereka (Gibson, 2000:248, Shankman, 1999:323, Donaldson & Preston, 1995:73). Deontologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang bermakna "duty".

Dua aspek lainnya, yaitu aspek organisasional dan informasi memperkuat perbedaan antara dua perspektif pertama dengan perspektif *stakeholder theory*. Dimensi organisasional misalnya, menjelaskan bahwa terjadi perbedaan cara pandang mengenai organisasional antara *agency theory* dengan *stakeholder theory*. *Agency theory* melihat bahwa aspek organisasionalnya adalah *goal conflict*, sebagai konsekuensi dari asumsi-asumsi yang ada di aspek manusia (*human aspects*), sedangkan *stakeholder theory* lebih bersifat fleksibel karena asumsi-asumsi yang mendasar dari aspek manusia sangat bertentangan dengan kedua perspektif pertama. Selain itu dasar normatifnya lebih menekankan pada pertimbangan prinsip-prinsip moral (*deontological basis*). Arti penting informasi bagi ketiga perspektif berbeda antara *transaction cost* dan *stakeholder theory* dengan *agency theory*. *Agency theory* menganggap informasi sebagai komoditi yang dapat dibeli sehingga pemegang informasi dalam hal ini agensi atau manajer akan sangat berperan dan mempunyai bargaining yang besar untuk melakukan moral hazard dan *adverse selection* (*inside information*). Kondisi ini dikenal dengan istilah *information asymmetry* (Scott, 2000:7-11).

Isu-Isu Perdebatan dari Ketiga Perspektif Teori Organisasi

Ada tiga isu perdebatan yang muncul dari ketidaksamaan pandangan asumsi dasar dan proses disain organisasional, yaitu:

1. Pandangan Moral dan Etika Agensi,
2. Pandangan Hak kepemilikan, dan
3. Paradigma Egoisme.

1. Pandangan Moral dan Etika Agensi
 Dari deskripsi ketiga perspektif di atas, nampak dengan jelas menunjukkan bahwa hanya *stakeholder theory* yang mempertimbangkan prinsip-prinsip moral bahkan menjadi konsep normatif dalam teori stakeholder. Berikut ini penulis mengutip perspektif *agency theory* dan *transaction cost* yang menunjukkan kedua perspektif tersebut tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip moral. Noreen (1988:359) menyatakan *„At the heart of agency theory, as expounded in accounting, finance and economics is the assumption that people act unreservedly in their own narrowly defined self-interest with, if necessary, guile and deceit.* Demikian pula perspektif *transaction cost* yang menyatakan bahwa ada dua asumsi dasar perilaku manusia, yaitu:
 - a. *Bounded rationality*, dan
 - b. *Self interest*.

Bounded rationality diartikan bahwa manusia sebagai subjek informasi memiliki keterbatasan dalam melakukan pemrosesan informasi, sedangkan *self interest* atau *opportunism* diartikan bahwa manusia akan berakting untuk kepentingan dirinya dan menipu dalam rangka mempercepat tujuan mereka. Hal ini dikemukakan oleh Williamson (1975: 26) yakni *opportunism* adalah "*self-interest seeking with guile*". Noreen (1988) menawarkan solusi untuk mengatasi asumsi dasar *agency theory* dengan mengusulkan untuk mempertimbangkan dimasukkannya kode etik dalam kontrak antara prinsipal dan agensi. Hal ini penting agar prinsipal dan agensi dapat berperilaku altruistik (*altruistic behaviour*) yang nantinya membentuk perilaku etikal utilitarian. Perilaku altruistik ini merupakan lawan atau kontras dengan perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*). Perilaku altruistik ini dimotivasi oleh penekanan fundamental untuk kesejahteraan pihak lain. Dilain pihak perilaku etikal utilitarian dapat dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ada dalam hubungannya dengan kepentingan diri sendiri (Noreen, 1988:360). Bagaimana kode etika itu didorong untuk dilaksanakan, Noreen mengungkapkan bahwa ada 2 hal yang mendorong pentingnya konsep atau kode etik ini dipertimbangkan, yaitu:

1. Agama (*religion*), dan
2. Genetika (*genetics*).

Dalam agama Kristen, Yahudi, dan Islam telah ada konsep moral, sedangkan genetika pada setiap individu telah terprogram secara biologikal yang melekat secara *inherent* beberapa bagian kode etika, seperti gen pembawa sifat. (Noreen, 1988: 365). Ringkasnya Noreen mengusulkan agar konsep etika menjadi bahan pertimbangan dan merupakan salah satu bentuk kontrak dalam praktik penerapan *agency theory*, sedangkan konsep moral itu sendiri yang menjadi asumsi dasar didalam *stakeholder theory* akan dibahas berikut ini.

Perdebatan antara *agency theory* dengan *stakeholder theory* yang dikemukakan oleh Shankman (1999) pada dasarnya membahas asumsi-asumsi dan proses yang mendasari kedua teori tersebut. Esensi perdebatannya berkisar pada prinsip-prinsip moral yang dianut oleh *stakeholder theory*. Shankman (1999: 320) mengutip pendapat Quinn dan Jones (1995) yang menyatakan

...The very language of moral discourse is at odds with the dominant language of description in business, which is that of economics: self-interest versus duties. The discourse matters because the vocabulary of profit and self-interest nurtures in corporate employees a world view at odds with one that nurtures their moral sensibilities. The ideas and methods of moral philosophy do not find their way into the language and methods of either business or modern economics ...

Berdasarkan kutipan di atas, perdebatan *opportunism (self-interest)* menjadi hal utama dalam perdebatan tersebut. Disatu sisi *opportunism* merupakan konsep kapitalis, sementara disisi lain *duties* merupakan konsep deontologi yang menganut prinsip-prinsip moral. Konsep moral ini sangat penting artinya sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam model stakeholder. Quinn dan Jones (1995) menyatakan ...*Morally needs to be grounded in a well understood business or cultural context before managers will be persuaded to look to it for business policy guidance...*(Shankman 1999: 327).

Secara implisit, tanggungjawab moral yang dibangun teori stakeholder agar fungsi praktik business dapat berjalan dengan baik. Shankman mengemukakan ada empat prinsip dasar yang dapat dikembangkan dalam pengembangan teori stakeholder, yaitu:

1. *Honouring agreement;*
2. *Avoiding lying;*
3. *Respecting the autonomy of others,* dan
4. *Avoiding harm to others.*

Prinsip satu dan dua merupakan peran sentral dalam pandangan prinsipal-agensi yang mana secara implisit konsep moral itu sendiri telah ada dikedua konsep di atas, sedangkan prinsip ketiga dan keempat merupakan hubungan ekonomi yang mencakup pula hubungan prinsipal agensi. Quin & Jones (1995) menyebutnya *condition of liberty*.

Secara teoritikal konsep teori stakeholder merupakan konsep baru yang belum lama diperkenalkan dimana konsep baru ini merupakan konsep yang mempertimbangkan prinsip-prinsip moral. Namun demikian pelaksanaan dalam dunia praktik atau bisnis hal ini belum banyak diwujudkan karena konsep ini sendiri masih dalam tahapan pengembangan. Konsep teori stakeholder yang lengkap dijelaskan dalam suatu artikel dapat dibaca dari artikel Donaldson dan Preston (1995).

2. Pandangan "Hak Kepemilikan"

Transaction cost dan *Agency theory* memiliki pandangan yang berbeda dengan *Stakeholder theory* mengenai hak kepemilikan harta. Berdasarkan asumsi-asumsi dasar *Transaction cost* dan *Agency theory* menunjukkan bahwa hak kepemilikan harta dipandang sebagai kepemilikan prinsipal semata-mata, sehingga pandangan hak kepemilikan tersebut dianggap sebagai kepemilikan pribadi prinsipal (*ownership of private property*). Ini menjadi kewajiban moral bagi si agensi (manajer) untuk mengelola asset perusahaan hanya semata-mata untuk kepentingan pemilik perusahaan (prinsipal). Dengan kata lain, argumentasi dari teori ini menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai adalah mensejahterahkan kepentingan prinsipal dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Berbeda halnya dengan *Stakeholder theory* yang memandang hak kepemilikan tidak terbatas pada *private property -shareholders of the firm-*

semata-mata, melainkan hak kepemilikan mencakup *duties* untuk para pemilik stakeholder yang beragam -*multiple stakeholders*-, (Shankman 1999:327). Konsep kepemilikan yang ada dalam *Stakeholder theory* lebih menekankan pada kontribusi dari masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Implikasi dari konsep tersebut, menunjukkan bahwa kepemilikan asset perusahaan bukanlah milik mutlak prinsipal seperti pada *Transaction cost* dan *Agency theory*, melainkan ada pihak lain yang turut pula memberikan kontribusinya kepada perusahaan, misalnya kreditur, karyawan, pemerintah dan lain-lain. Konsep ini lebih dikenal pula dengan konsep *corporate social responsibility*.

3. Paradigma Egois

Kontroversi yang ketiga adalah adanya perbedaan asumsi yang melekat pada perilaku manusia (agensi). Pandangan *Agency theory* melihat bahwa didalam diri individual terdapat perilaku yang melekat yang disebut *morally hazardous* yang mencakup sikap *opportunistic* dan *adverse selection*. Sikap *opportunistic* inilah yang mendominasi perilaku manajer (agensi) sehingga perilaku berbuat sesuatu untuk kepentingan diri sendiri yang didahulukan yang mencakup sikap berbohong, menipu, dan sikap negatif lainnya. Berbeda halnya dengan *Stakeholder theory* yang lebih mengedepankan pandangan moral -*deontological philosophy*- yang mana sikap *seft of interest* tersebut akan dicerahkan atau bukan menjadi motivasi utama bagi agensi dalam melakukan aktivitasnya didalam perusahaan. Hal ini berarti pandangan teori ini terhadap pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan akan berbeda dengan kedua teori yang telah disebutkan lebih dahulu, pandangan teori ini melihat hubungan antara prinsipal dan agensi bukan suatu hubungan yang searah melainkan hubungan timbal balik, dan malahan pihak-pihak lainnya (*all stakeholders*) turut pula menjadi faktor utama dalam hubungannya dengan aktivitas perusahaan. Dengan kata lain, partisipan dalam organisasi bukan hanya dilihat dalam bentuk hubungan antara prinsipal dan agensi, tetapi semua pihak-pihak yang berkepentingan (*all stakeholders*). Dalam kondisi seperti ini perilaku agensi bukan lagi dituntut bersifat *opprtunistik (opportunistic)*, melainkan bersifat *altruistik (altruistic)*. Sikap *altruistik* adalah sikap atau perilaku manajer (agensi) yang lebih mementingkan kepentingan orang banyak, dalam hal ini para *stakeholders*. Implikasi dari sikap *altruistik* tersebut menjelaskan bahwa para manajer dalam melakukan aktivitasnya harus mengedepankan sikap moral, bukannya amoral, anti-sosial, dan anti-organisasional yang dimiliki oleh kedua teori terdahulu (*Transaction cost* dan *Agency theory*).

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan perbandingan dan analisis dari ketiga jenis

perspektif di atas, beberapa kesimpulan yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Dari ketiga perspektif disain organisasional yang ada di dalam disiplin ilmu ekonomi, *transaction cost* dan *agency theory* nampaknya sulit berintegrasi dengan perspektif *stakeholder theory* karena asumsi dasar yang mendasari muncul dan berkembangnya perspektif tersebut berbeda.
2. *Transaction cost* dan *Agency theory* berkembang didasari pada pandangan rasional dan melekat secara *inherently* konsep kapitalisme yang pada dasarnya tidak memberikan tempat berkembangnya prinsip-prinsip moral. Sebaliknya *Stakeholder theory* yang merupakan perspektif baru di disiplin ilmu ekonomi justru mendasari prinsip-prinsip moral, malahan menjadi asumsi dasar dari perspektif tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari basis normatifnya teori ini yang mempertimbangkan prinsip moral (*deontological basis*).
3. Isu-isu perdebatan mengenai pandangan moral dan etika, hak kepemilikan, dan paradigma egoisme merupakan isu-isu utama yang menyebabkan hingga saat ini *Transaction cost* dan *Agency theory* tidak dapat berintegrasi dengan *Stakeholder theory*. Namun demikian alternatif terbaik yang sekarang ini dapat dilakukan dan berkembang adalah ketiga teori tersebut dipandang sebagai hubungan yang saling komplementer.

REFERENSI

- Bøhren, Ø. 1998. The agent's ethics in the principal-agent model. *Journal of Business Ethics*, 17: 745-755
- Clarkson, M. B., 1995. A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance. *Academy of Management Review*, 20 (1): 92-117
- Donaldson, T. & Preston, L. E., 1995. The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications, *Academy of Management Review*, 20 (1): 65-91
- Eisenhardt, K. M., 1989. Agency theory: an assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1): 57-74
- Frooman, J. 1999. Stakeholder influence strategies. *Academy of Management Review*, 24(2): 191-205
- Gibson, K., 2000. The moral basis of stakeholder theory. *Journal of Business Ethics*, 26: 245-257
- Greening, D. W. & Gray, B., 1994. Testing a model of organizational response to social and political issues. *Academy of Management Journal*, 37(3): 467-498
- Hall, R. H., 1982. *Organizations, structure and process* (Third ed.). New Jersey: Prentice Hall
- Hosmer, L. T., 1995. Trust: the connecting link between organizational theory and philosophical ethics. *Academy of Management Review*, 20 (2): 379-403
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H., 1976. Theory of the firm: managerial behavior, agency theory and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. 3: 305-360
- Jensen, M. C., 1983. Organization theory and methodology. *The Accounting Review*. LVIII(2): 319-339
- Jones, T., 1995. Instrumental stakeholder theory: a synthesis of ethics and economics. *Academy of Management Review*, 20(2):404-437

- Jones, T. M., Wicks, A. C., 1999. Convergent stakeholder theory, *Academy of Management Review*, 24(2): 206-221
- Koehn, D., 1999. What can eastern philosophy teach us about business ethics?. *Journal of Business Ethics*, 19: 71-79
- Kulkarni, S. P., 2000. Environmental ethics and information asymmetry among organizational stakeholders. *Journal of Business Ethics*, 27: 215-228
- Morris, R. D., 1987. Signalling, agency theory and accounting policy choice. *Accounting and Business Research*, 18(69):47-56
- Nicholson, N. 1994. Ethics in organizations: a framework for theory and research. *Journal of Business Ethics*, 13: 581-596
- Noreen, E., 1988. The economics of ethics: a new perspective on agency theory. *Accounting, Organizations and Society*, 13(4): 359-369
- Ouchi, W. G., 1979. A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. *Management Science*, 25(9): 833-848
- Pfeffer, J., 1982. *Organizations and organization theory*. Marshfield, MA: Pitman
- Pfeffer, J. & Salancik, G. R., 1978. *The external control of organizations*. New York Harper & Row
- Phillips, Robert A. & Reichart, J., 2000. The Environment as a stakeholder? a fairness based approach. *Journal of Business Ethics*, 23: 185-197
- Roberts, P. T. & Greenwood, R., 1997. Integrating transaction cost and institutional theories: toward a constrained-efficiency framework for understanding organizational design adoption. *Academy of Management Review*, 22(2): 346-373
- Ross, S. A., 1973. The economic theory of agency: the principal's problem. *American Economic Association*. 63(2):134-139
- Sharma, A., 1997. Professional as agent: knowledge asymmetry in agency exchange. *Academy of Management Review*, 22(3): 758-798
- Scott, R. W., 1998. *Organizations, rational, natural, and open systems* (Fourth ed.). New Jersey: Prentice Hall
- Scott, W. G., Mitchell, T. R. & Birnbaum, P. H., 1981. *Organization theory, a structural and behavioral analysis* (Fourth ed.). Illinois: Irwin
- Scott, W. R., 2000. *Financial Accounting Theory*. (Second ed.). Ontario: Prentice Hall
- Shankman, N. A., 1999. Reframing the debate between agency and stakeholder theories of the firm. *Journal of Business Ethics*, 19: 319-334
- Taylor, S., Beechler, S. & Napier, N., 1996. Toward an integrative model of strategic international human resource management, *Academy of Management Review*, 21 (4): 959-985
- Ulrich, D. & Barney, J. B., 1984. Perspectives in organizations: resource dependence, efficiency, and population. *Academy of Management Review*, 9(3): 471-481
- Van de Ven, A. H. & Poole, M. S., 1995. Explaining development and change in organizations, *Academy of Management Review*, 20(3):510-540
- Walker, Martin., 1989. Agency theory: a falsificationist perspective. *Accounting, Organization and Society*. 14(5/6): 433-453
- Williamson, O. E. & Ouchi, W. G. 1981. The market and hierarchies program of research: origins, implications, prospects. In A. H. Vande Ven & W. F. Joyce (Eds.), *Perspectives on organization design and behavior*: 347-370. New York: Wiley-Interscience
- Williamson, O. E. 1998. Transaction cost economics. In Schmalensee, R. & Willig, R. 1998 (Eds.), *Handbook of industrial organization*: 135-181. Oxford: Elsevier Science
- Wright, P. M. & McMahan, G. C., 1992. Theoretical perspectives for strategic human resource management. *Journal of Management*, 18(2): 295-320
- Quinn, D. P. & Jones, T. M., 1995. An agent morality view of business policy. *Academy of Management Review*, 20(1): 22-42